

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan hambatan utama bagi kemajuan ekonomi, baik di negara maju maupun berkembang. Kemiskinan tetap menjadi masalah utama di Indonesia, karena sangat berkaitan dengan keterbatasan akses masyarakat terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan standar hidup yang layak. Menurut Aulia (2025), kemiskinan tetap menjadi masalah besar, terutama di daerah-daerah dengan tingkat ketimpangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Kemiskinan tidak hanya didefinisikan oleh pendapatan yang rendah, tetapi kurangnya akses terhadap layanan dasar dan infrastruktur yang memadai (Todaro & Smith, 2020).

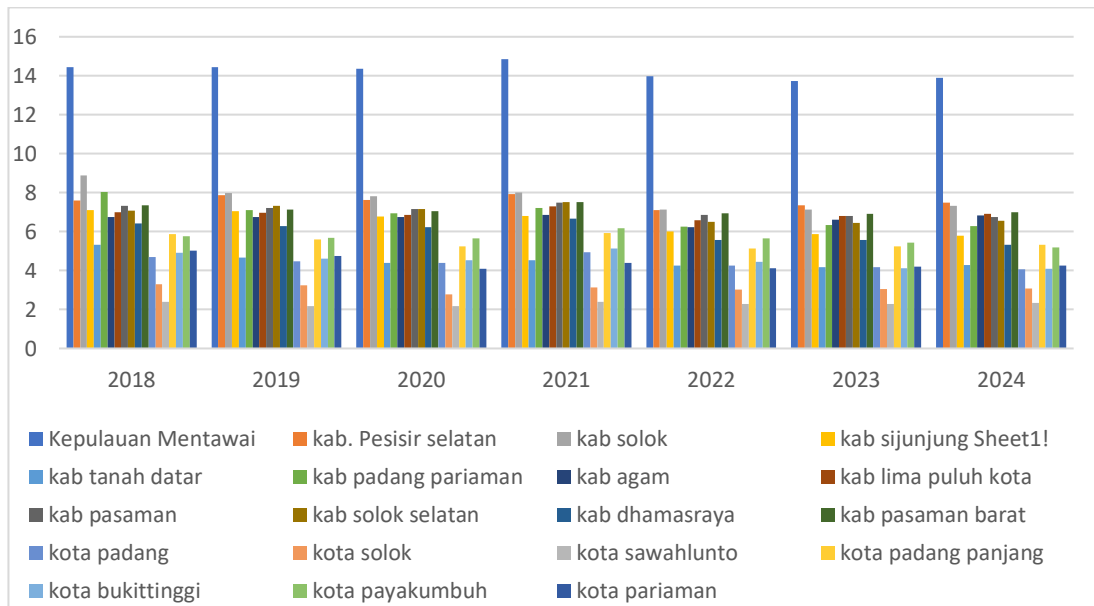
Kondisi tersebut menjadi semakin kompleks di Indonesia mengingat jumlah penduduk yang besar dan karakteristik wilayah yang beragam. Dengan populasi yang tinggi, pemerintah dituntut untuk memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan seluruh masyarakat. Kemiskinan di Indonesia tidak hanya menjadi persoalan ekonomi semata. Banyak faktor lain, termasuk pendapatan, kondisi kesehatan, tingkat pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, letak geografis, serta ketersediaan terhadap infrastruktur dasar juga mempengaruhi persoalan tersebut (Rahayu, 2018).

Dinamika kemiskinan di Indonesia juga tercermin di berbagai Provinsi di Indonesia khususnya Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Barat dipilih karena memiliki kondisi sosial ekonomi yang relevan dengan variabel penelitian. Meskipun indikator pembangunan manusia terus mengalami peningkatan, tingkat kemiskinan antar kabupaten/kota masih menunjukkan perbedaan yang cukup besar.

Selain itu, akses sanitasi layak di beberapa daerah juga masih relatif rendah, sehingga berpotensi mempengaruhi kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat (BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024).

Di sisi lain, program bantuan sosial masih menjadi instrumen penting pemerintah dalam menjaga kondisi ekonomi rumah tangga miskin, terutama pada wilayah yang rentan terhadap bencana alam seperti banjir, longsor, dan gempa bumi. Kondisi tersebut membuat Sumatera Barat memiliki karakteristik yang sesuai untuk menganalisis pengaruh IPM, bantuan sosial pangan, dan sanitasi layak terhadap persentase penduduk miskin (Kementerian Sosial RI, 2024). Selain fenomenanya relevan, data antar kabupaten/kota di Sumatera Barat juga tersedia secara lengkap dan konsisten selama periode 2018–2024, sehingga mendukung penggunaan analisis data panel.

Berdasarkan data yang di peroleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat selama periode 2018-2024, tingkat persentase penduduk miskin menunjukkan dinamika yang berfluktuasi meskipun secara umum Sumatera Barat masih memperlihatkan adanya kesenjangan antar wilayah Kabupaten/Kota yang mencerminkan perbedaan akses masyarakat terhadap Pendidikan, layanan kesehatan, serta infrastruktur dasar di berbagai Kabupaten/Kota (BPS Provinsi Sumatera Barat., 2018-2024). Secara lebih spesifik, fenomena permasalahan persentase penduduk miskin dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber: BPS Sumatera Barat

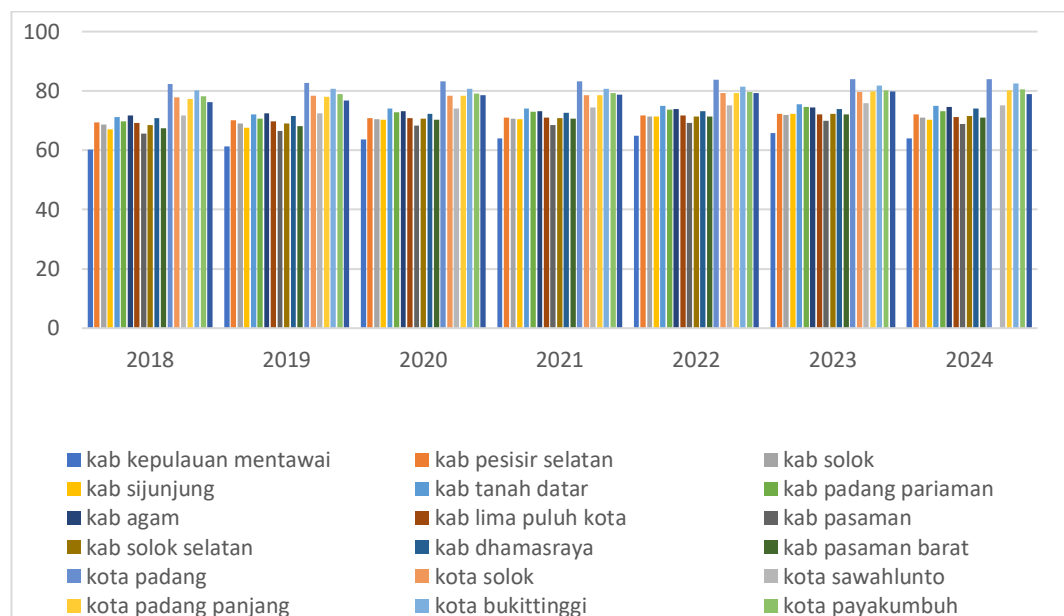
Gambar 1. 1 kemiskinan Kabupaten/kota Sumatera Barat Tahun 2018-2024

Berdasarkan grafik persentase penduduk miskin Kabupaten/Kota di Sumatera Barat selama periode 2018-2024, dimana permasalahan kemiskinan masih berfluktuasi antar wilayah, dimana daerah kepulauan dan beberapa kabupaten masih mengalami tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan selama periode 2018-2024.

Sipahutar & Adanan (2023), menjelaskan bahwa rendahnya kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu faktor utama penyebab tingginya jumlah penduduk miskin. Rendahnya nilai IPM berdampak pada rendahnya produktivitas tenaga kerja yang akhirnya akan menyebabkan pendapatan yang diterima menjadi rendah dan pada akhirnya mendorong peningkatan jumlah penduduk miskin.

Menurut United Nations Development Programme (2024) IPM adalah indikator yang mencerminkan tingkat kualitas sumber daya manusia melalui tiga aspek utama, yaitu kondisi kesehatan, tingkat Pendidikan serta standar hidup yang layak,

Ketiga aspek ini saling berhubungan dalam membentuk kemampuan individu untuk berperan aktif dan produktif dalam aktivitas ekonomi maupun sosial. Secara lebih spesifik persoalan ini juga tercermin di Provinsi Sumatera khususnya di Kabupaten/Kota, perkembangan IPM menunjukkan kecenderungan yang masih berfluktuasi dari tahun 2018-2024, hal ini dapat dilihat dari grafik berikut.



Sumber: BPS Sumatera Barat, 2026

Gambar 1. 2 Indeks Pembangunan Manusia tahun 2018-2024 (Indeks)

Berdasarkan grafik di atas selama periode 2018–2024, dapat dilihat bahwa nilai IPM di setiap daerah di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat secara umum berada pada kisaran sekitar 60 hingga lebih dari 80. Secara keseluruhan, grafik tersebut menunjukkan bahwa IPM selama tahun 2018–2024 mengalami perkembangan yang cukup baik dengan tren peningkatan yang konsisten, meskipun masih terdapat perbedaan tingkat IPM antara wilayah Kabupaten dan wilayah Kota.

Pemerintah Indonesia melaksanakan berbagai program perlindungan sosial yang ditujukan kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah untuk

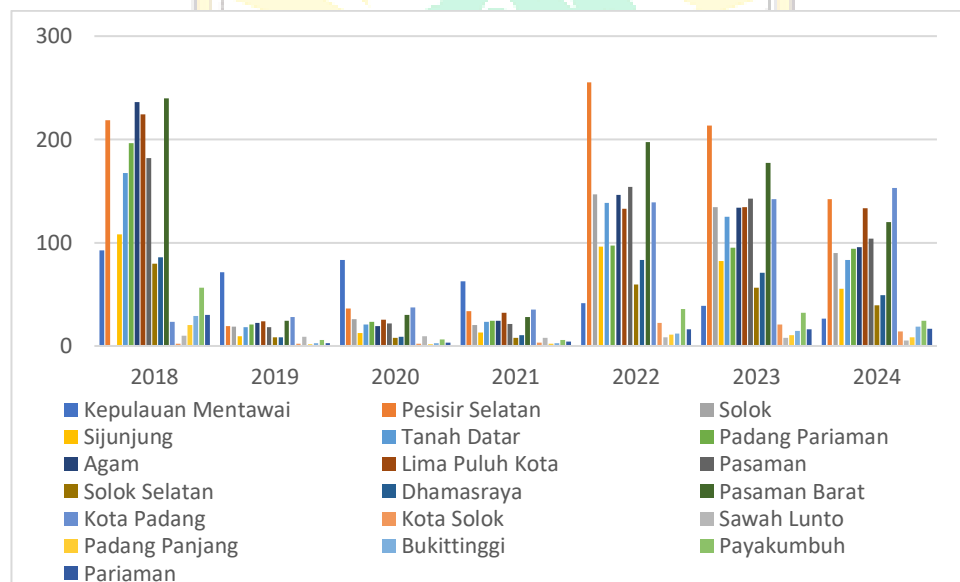
mengurangi tingkat kemiskinan, khususnya keluarga penerima manfaat (KPM). Bantuan tersebut disalurkan dalam bentuk tunai maupun non-tunai, termasuk melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), serta Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program-program ini dirancang untuk membantu rumah tangga berpenghasilan rendah untuk memenuhi kebutuhan pokok, meningkatkan kemampuan daya beli, serta mengurangi tingkat kerentanan ekonomi yang dihadapi masyarakat.

Menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia (2025), bantuan sosial memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas kesejahteraan masyarakat, terutama pada masa-masa ketidakstabilan ekonomi, seperti kenaikan harga kebutuhan pokok dan ketidakpastian ekonomi. Selain itu, bantuan sosial juga berfungsi sebagai mekanisme perlindungan yang dapat mencegah masyarakat miskin mengalami penurunan kesejahteraan yang lebih parah.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya, efektivitas program bantuan sosial, khususnya bantuan pangan, masih menjadi isu yang perlu diperhatikan. Di sejumlah wilayah, peningkatan jumlah keluarga penerima manfaat belum sesuai dengan penurunan tingkat kemiskinan yang signifikan. Permasalahan ini menunjukkan bahwa penyaluran bansos belum berjalan secara optimal, baik dari aspek ketepatan sasaran, besaran bantuan, maupun keberlanjutan program.

Berdasarkan Kementerian Sosial Republik Indonesia, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah rumah tangga yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah. Dalam penelitian ini, variabel KPM bantuan sosial pangan digunakan sebagai ukuran untuk menggambarkan jumlah rumah tangga

yang memperoleh bantuan pangan melalui program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) serta data bersumber dari Badan Pusat Statistik. Variabel ini menjadi penting untuk dianalisis karena mencerminkan peran intervensi pemerintah dalam membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan konsumsi dasar. Permasalahan ini memerlukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh rumah tangga penerima bantuan pangan terhadap persentase penduduk miskin, khususnya pada level daerah. Secara lebih spesifik fenomena tersebut juga terjadi di provinsi Sumatera Barat, sebagaimana dapat dilihat pada grafik realisasi jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) 2018-2024 di kab/kota provinsi Sumatera Barat.



Sumber: BPS Sumatera Barat

Gambar 1. 3 Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Pangan

Berdasarkan grafik tersebut selama periode 2018-2024 menunjukkan pola yang berfluktuasi, dimana pada tahun 2018 data relatif tinggi dan bervariasi antara daerah, kemudian pada tahun 2019 hingga 2021 terjadi penurunan yang sangat signifikan di hampir seluruh wilayah. Memasuki tahun 2022 hingga 2024, stabil

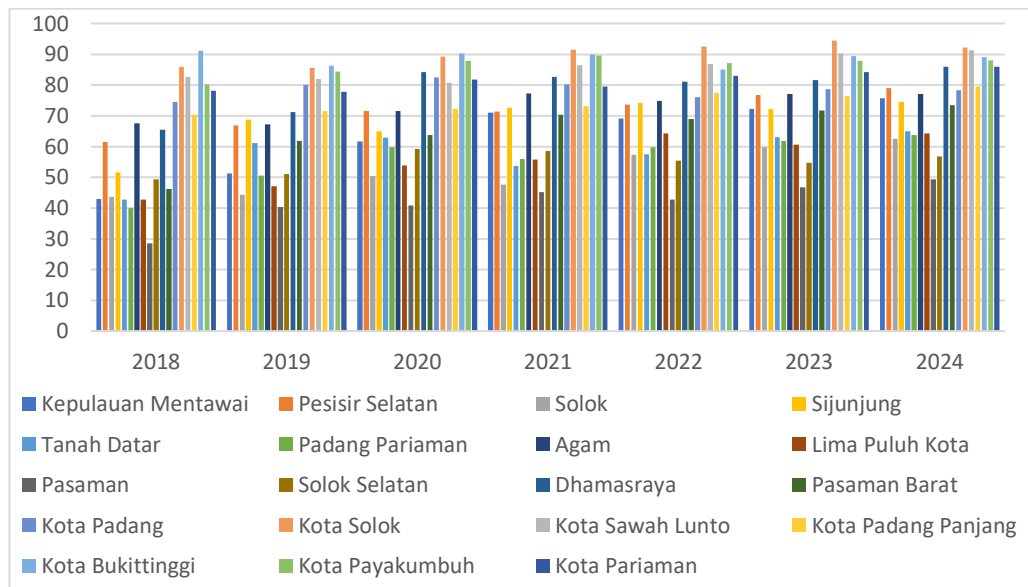
dengan nilai yang relatif merata di seluruh Kabupaten/Kota, serta tidak lagi menunjukkan lonjakan ekstrem seperti pada tahun sebelumnya, Sehingga dapat disimpulkan bahwa kondisi pada periode akhir pengamatan lebih terkendali dan konsisten.

(Hadna & Media, 2022), menyebutkan bahwa program bantuan tunai, baik yang bersifat bersyarat maupun tidak bersyarat, di Indonesia memberikan dampak positif terhadap pola konsumsi rumah tangga miskin serta meningkatkan akses terhadap layanan dasar. Berbeda dengan penelitian Istriawati dan Dartanto (2022), mengenai dampak Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menunjukkan bahwa program tersebut memang mampu meningkatkan tingkat konsumsi pangan rumah tangga penerima bantuan.

Akses terhadap layanan sanitasi yang aman merupakan komponen penting dari upaya meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, karena sanitasi yang buruk tidak hanya berdampak pada penyebaran penyakit tetapi juga menghambat perkembangan sosial dan ekonomi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (WHO, 2024). Oktania et al (2025), menyimpulkan bahwa akses terhadap sanitasi layak memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia, yang berarti bahwa semakin baik fasilitas sanitasi yang dimiliki oleh rumah tangga, semakin kecil kemungkinan masyarakat berada dalam kondisi miskin.

Peningkatan infrastruktur dasar terbukti mampu memperbaiki kondisi kesehatan masyarakat dan mengurangi beban ekonomi rumah tangga. Sejalan dengan hasil penelitian tersebut, fenomena tersebut juga terlihat di Kabupaten/Kota

Sumatera Barat dari tahun 2018-2024 yang juga terdapat ketimpangan terhadap akses sanitasi layak sebagai berikut.



Sumber: BPS Sumatera Barat

Gambar 1. 4 Sanitasi Layak Tahun 2018-2024 (%)

Grafik tersebut menunjukkan persentase akses sanitasi layak selama tahun 2018-2024 yang secara umum mengalami peningkatan dari waktu ke waktu meskipun terdapat fluktuasi di beberapa daerah. Pada periode awal, masih terlihat beberapa wilayah dengan capaian rendah, namun mulai meningkat pada tahun-tahun berikutnya hingga cenderung lebih stabil pada periode 2022-2024 dengan tingkat yang lebih tinggi. Meskipun demikian, masih terdapat ketimpangan antara daerah, di mana sebagian wilayah telah mencapai akses sanitasi yang tinggi (sekitar 80-90%), sementara daerah lainnya masih berada pada kisaran yang lebih rendah (sekitar 40-60%), sehingga menunjukkan bahwa pemetaan akses sanitasi layak di Sumatera Barat belum sepenuhnya tercapai.

Penelitian Rizki dan Saleh (2024), di Provinsi Jawa Tengah yang menyatakan bahwa akses sanitasi rumah tangga berkaitan erat dengan kemampuan ekonomi masyarakat, karena sanitasi yang baik mampu menekan risiko penyakit, mengurangi biaya pengobatan, serta mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga. Akses air minum dan sanitasi memberikan kontribusi nyata dalam upaya penurunan kemiskinan (Putri dan Samsudi, 2025).

Berdasarkan berbagai temuan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia, KPM bantuan sosial melalui keluarga penerima manfaat, serta akses sanitasi layak memiliki peran penting dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan. Namun sebagian besar penelitian sebelumnya masih menganalisis pengaruh variabel-variabel tersebut secara parsial dan dilakukan di daerah yang berbeda-beda. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan adanya perbedaan temuan terkait besarnya pengaruh masing-masing variabel terhadap kemiskinan, yang dipengaruhi oleh sosial, ekonomi, dan kelembagaan daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh IPM, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial pangan dan Sanitasi layak terhadap persentase penduduk miskin studi kasus Kabupaten/Kota di Sumatera Barat 2018-2024”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh IPM terhadap persentase penduduk miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat?

2. Bagaimana pengaruh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial pangan terhadap persentase penduduk miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat?
3. Bagaimana pengaruh akses sanitasi layak terhadap persentase penduduk miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat?
4. Bagaimana pengaruh IPM, KPM bantuan sosial pangan, dan akses sanitasi layak secara simultan terhadap persentase penduduk miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat?

1.3 Tujuan penelitian

1. Untuk menganalisis IPM terhadap persentase penduduk miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat?
2. Untuk menganalisis Pengaruh Keluarga Manfaat (KPM) bantuan sosial pangan terhadap persentase penduduk miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat?
3. Untuk menganalisis pengaruh akses sanitasi layak terhadap persentase penduduk miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat?
4. Untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), KPM, dan sanitasi layak secara simultan terhadap persentase penduduk miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat?

1.4 Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi

pembangunan dan ekonomi regional, yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji permasalahan kemiskinan secara komprehensif.

b) Manfaat praktis

1) Bagi pemerintah daerah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan dan perumusan kebijakan pembangunan daerah, khususnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi, optimalisasi program bantuan sosial, serta perbaikan infrastruktur dasar.

2) Bagi instansi terkait

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi instansi terkait, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan, dalam merancang serta melaksanakan program pembangunan yang lebih tepat sasaran, efektif dan berkelanjutan

3) Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan, sehingga dapat mendorong

partisipasi aktif dalam mendukung program pembangunan daerah.

4) Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji permasalahan kemiskinan dengan menggunakan variabel maupun wilayah penelitian yang berbeda.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan dari tahun 2018-2024 dan melibatkan 19 Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah persentase penduduk miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, Indeks Pembangunan Manusia, KPM bantuan sosial pangan, dan sanitasi layak di Sumatera Barat.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang diterapkan dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini mencakup enam sub-bab yang membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan ruang lingkup penelitian.

BAB II TINJAUAN LITERATUR

Bab ini membahas teori-teori yang relevan mengenai persentase penduduk Miskin, IPM, KPM bantuan sosial pangan, dan sanitasi layak. Selain itu, disajikan juga hasil penelitian terdahulu, kerangka konseptual, serta hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan desain penelitian, jenis dan sumber data, variabel penelitian, metode analisis yang digunakan, serta definisi operasional variabel.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil analisis kuantitatif mengenai pengaruh IPM, KPM bantuan sosial pangan, dan sanitasi layak terhadap Persentase Penduduk Miskin serta interpretasi dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang dapat diberikan baik untuk penelitian selanjutnya maupun bagi pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah daerah.